

**TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020**

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
KEPALA KANTOR WILAYAH						
1.	Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya Satuan Kerja yang memperoleh nilai RB Sangat Baik (>70-80)	Meningkatnya jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Nilai RB Sangat Baik (>70-80)	B03: 1. Pembentukan Tim RB Satuan Kerja 2. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) 3. Persiapan Pemenuhan data dukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020 4. Persiapan Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020	B03: 1. SK Tim RB dan Tim Pembangunan ZI 2. Laporan Persiapan	B03: 1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja di Wilayah Kanwil Jawa Tengah (72 TIM) 2. Laporan Persiapan a. Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas melalui seleksi secara kompetensi, integritas serta

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						komitmen Menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja di Wilayah Kanwil Jawa Tengah (72 TIM : 59 TIM WBK, 13 TIM WBBM) b. Mempersiapkan dan membagikan video infografis yang memuat tentang zi, manfaat yang diperoleh bagi organisasi,

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pegawai dan masyarakat serta memuat ulasan tentang UPT yang telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM di tahun 2019 dari sisi 6 area perubahan yang telah dilakukan</p> <p>c. Mempersiapkan dan melaksanakan deklarasi pembangunan ZI dengan mengundang</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>instansi lainnya (72 Satker)</p> <p>d. Mengusulkan 39 satker yang sudah diidentifikasi kan untuk meraih WBK dan 12 Satker meraih WBBM</p> <p>e. Melakukan pendamping an ke UPT yang diusulkan dan melakukan identifiaksi UPT yang akan diusulkan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						WBK dan WBBM tahun 2021 3. Persiapan PMPRB Tahun 2020 a. Membuat dan menshare video infografis penjelasan dari setiap data dukung PMPRB tahun 2020 yang menjadi target sebagai pedoman TIM di Kanwil dan UPT b. Memberikan penguatan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						kepada assessor PMPRB 4. Persiapan Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020 a. Membuat surat kepada UPT dan Nodis kepada seluruh anggota tim untuk mempersiapkan an data dukung. Mempersiap kan data dukung Rencana Kerja

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>Tahunan RB tahun 2020</p> <p>b. Mengadakan rapat membahas dan memverifikasi tentang kelengkapan data dukung</p> <p>c. Mengunggah data dukung dan mengarsipkan</p>
				<p>B06:</p> <p>1. Tindak lanjut internalisasi pelaksanaan <i>Road Map</i> Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 serta Rencana Kerja</p>	<p>B06:</p> <p>Laporan</p>	<p>B06:</p> <p>1. Laporan Tindak lanjut internalisasi pelaksanaan <i>Road Map</i> Kementerian Hukum dan HAM Tahun</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Tahunan RB Tahun 2020 2. Internalisasi Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB 3. Internalisasi Aplikasi E-RB 4. Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020		2020-2024 serta Rencana Kerja Tahunan RB Tahun 2020 a. Melakukan Internalisasi dan sosialisasi pelaksanaan <i>Road Map</i> Kementerian Tahun 2020-2024 serta Rencana Kerja Tahunan RB Tahun 2020 di Wilayah Jawa Tengah melalui video infografis yang dishare ke TIM di

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						kanwil dan UPT b. Membuat surat ke UPT dan Nodis ke tim RB untuk menyiapkan data dukung yang menjadi amanat dari road map dan menyusun rencana kerja tahunan RB c. Melakukan pembahasan draft rencana kerja tahunan RB usulan UPT yg telah disusun oleh tim RB Kanwil

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>d. Menyampaikan rencana kerja tahunan RB Kanwil ke kementerian</p> <p>2. Laporan Internalisasi Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB</p> <p>a. Melakukan Internalisasi dan sosialisasi pelaksanaan PMPRB di Wilayah Jawa Tengah melalui videoinfografis yang dishare ke</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>TIM di kanwil dan UPT</p> <p>b. Membuat surat ke UPT dan Nodis ke tim RB untuk menyiapkan data dukung yang menjadi amanat dari PMPRB</p> <p>c. Melakukan pembahasan dalam rapat evaluasi internalisasi dan kesiapan data dukung sebagai amanat dalam PMPRB</p> <p>d. Menyampaikan laporan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>hasil internalisasi PMPRB ke kementerian</p> <p>3. Laporan Internalisasi Aplikasi E-RB</p> <p>a. Melakukan Internalisasi aplikasi e-RB di Wilayah Jawa Tengah melalui video tutorial yang dishare ke TIM di kanwil dan UPT</p> <p>b. Membuat surat ke UPT dan Nodis ke tim RB untuk menggunakan aplikasi e-RB dalam</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>rangka pelaporan data dukung RB</p> <p>c. Menyampaikan laporan hasil internalisasi aplikasi e-RB ke kementerian</p> <p>4. Laporan Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020</p> <p>a. Membuat surat ke UPT untuk menyampaik data dukung melalui e-RB</p> <p>b. Tim RB kanwil</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>memverifikasi dan mengunggah data dukung ke e-RB</p> <p>5. Laporan Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020</p> <p>a. Membuat surat ke UPT untuk menyampaikan data dukung rencana kerja tahunan RB dari masing-masing UPT</p> <p>b. Tim RB kanwil memverifikasi</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						dan meng- unggah data dukung rencana kerja tahunan RB
				B09: 1. Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 2. Pemenuhan data dukung Rencana KerjaTahunan RB tahun 2020	B09: Laporan	B09: 1. Laporan Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 a. Membuat surat ke UPT untuk menyampai- kan data dukung rencana kerja tahunan RB b. Tim RB kanwil memverifikasi dan meng- unggah data

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>dukung rencana kerja tahunan RB</p> <p>2. Laporan Pemenuhan data dukung Rencana KerjaTahunan RB tahun 2020</p> <p>a. Membuat surat ke UPT untuk menyampai kan data dukung rencana kerja tahunan RB dari masing-masing UPT</p> <p>b. Tim Kanwil mem-verifikasi dan mengunggah data dukung</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						rencana kerja tahunan RB
				B12: 1. Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 2. Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020	B12: Laporan	B12: 1. Laporan Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 a. Membuat surat ke UPT untuk menyampaikan data dukung rencana kerja tahunan RB b. Tim RB kanwil memverifikasi dan mengunggah data dukung rencana kerja tahunan RB

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>2. Laporan Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020</p> <p>a. Membuat surat ke UPT untuk menyampaik data dukung rencana kerja tahunan RB dari masing-masing UPT</p> <p>b. Tim Kanwil mem verifikasi dan meng-unggah data dukung rencana kerja tahunan RB</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
2.	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi dan peningkatan nilai maturitas SPIP	1. Terlaksananya SPIP dengan fokus kepada Peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan maturitas SPIP	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP Kemenkumham terdefinisi dengan interval skor 3 menuju 4	B03: 1. Pembentukan / Pembaharuan Satgas SPIP di Kantor wilayah dan UPT 2. Sosialisasi Target Tingkat Maturitas SPIP pada Kantor Wilayah dan UPT oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan	B03: 1. SK Tim Satgas SPIP 2. Laporan hasil sosialisasi	B03: 1. Pembentukan/ Pembaharuan Satgas SPIP di Kantor wilayah dan UPT a. Membuat SK Tim Satgas SPIP pada Kantor Wilayah dan UPT di Wilayah Jawa Tengah b. Rapat pembahas an penyeleng garaan tentang SPIP dan persiapan sosialisasi maturitas SPIP

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						2. Laporan hasil sosialisasi a. Membuat surat permohonan narasumber untuk sosialisasi SPIP oleh Itjen dan BPKP Perwakilan b. Sosialisasi Target Tingkat Maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan pada Kantor Wilayah dan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						UPT di Jawa Tengah c. Membuat surat ke UPT dan nodis ke tim SPIP untuk menyusun target tingkat maturitas SPIP
				B06: 1. Pendampingan Penguatan Tingkat Maturitas SPIP pada Kantor Wilayah dan UPT oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan 2. <i>Self assesment</i> penilaian maturitas SPIP Kanwil dan UPT	B06: 1. Laporan hasil pendampingan penguatan 2. Hasil Penilaian <i>Self Assesment</i> Kanwil dan UPT	B06: 1. Laporan hasil pendampingan penguatan a. Membuat surat pendampingan kepada Itjen dan BPKP Perwakilan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						b. Pelaksanaan pendamping-an penguatan tingkat maturitas SPIP dengan perwakilan upt yg datang membawa target tingkat maturitas yg telah disusun, penyusunan dilakukan per jenis satker dengan mengundang Ka UPT

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>secara langsung</p> <p>2. Hasil Penilaian <i>Self Assessment</i> Kanwil dan UPT</p> <p>a. Melakukan <i>Self assesment</i> penilaian maturitas SPIP pada Kanwil dan UPT di Wilayah Jawa Tengah</p> <p>b. Pelaporkan hasil self assessment penilaian maturitas SPIP ke Kementerian</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: Monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Kanwil dan UPT	B09: Laporan monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP	B09: 1. Membuatkan sp kepada tim spip untuk melakukan monev di 3 karesidenan (upt diundang dalam satu tempat per karesidenan) 2. Melaksanakan monev di 3 karesidenan
				B12: Monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Kanwil dan UPT	B12: Laporan monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP	B12: 1. Membuatkan sp kepada tim spip untuk melakukan monev di 3 karesidenan (upt diundang dalam satu

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						tempat per karesidenan) 2. Melaksanakan monev di 3 karesidenan
		2. Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018	B03 : Persiapan pendampingan MR: 1. Berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. <i>Workshop/Rapat</i> Dala m Kantor (RDK)	B03 : Notula/Laporan kegiatan persiapan pendampingan MR	B03: 1. Berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan a. Membentuk Tim Manajemen Risiko Kanwil Jateng b.Membuat surat permohon an pendamping an kepada BPKP Perwakilan 2. Melaksana kan workshop

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						tentang manajemen resiko
				B06: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B06: Laporan pendampingan penerapan MR	B06: 1. Membuat surat untuk melakukan pendampingan ke BPKP Perwakilan 2. Melakukan pendampingan penerapan MR pada 8 UPT di Karesidenan Pati
				B09: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B09: Laporan pendampingan penerapan MR	B09: 1. Membuat surat untuk melakukan pendampingan ke BPKP Perwakilan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						2. Melakukan pendampingan penerapan MR pada 8 UPT di Karesidenan Semarang
				B12: Evaluasi pelaksanaan MR	B12: Laporan kompilasi evaluasi pelaksanaan MR	B12: 1. Melakukan rapat tim untuk mengevaluasi pelaksanaan MR 2. Menyusun laporan pelaksanaan MR
3.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan	Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen dan BPK	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen dan BPK	B03: 1. Inventarisasi data temuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Itjen	B03: 1. Laporan TLHP 2. Bukti Penyetoran	B03: 1. Laporan TLHP a. Membentuk tim tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK dan Itjen

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	Pemeriksa Keuangan (BPK)			2. Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyelenggarakan rapat tim untuk melakukan inventarisasi temuan TLHP BPK dan Itjen c. Menyusun laporan hasil inventarisasi temuan TLHP BPK dan Itjen <p>2. Bukti</p> <p>Penyetoran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membuat surat ke upt untuk segera menyelesaikan TLHP BPK dan Itjen berdasarkan hasil inventarisasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						b. melaporkan bukti setor TLHP yg telah diterima dari satker ke Itjen tembusan ke Setjen
				B06: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B06: 1. Laporan TLHP 2. Bukti penyetoran	B06: 1. Membuat surat ke upt untuk segera menyelesaikan TLHP BPK dan Itjen 2. Melaporkan bukti setor TLHP yg telah diterima dari satker ke Itjen tembusan ke Setjen

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B09: 1. Laporan TLHP 2. Bukti penyetoran	B09: 1. Membuat surat ke upt untuk segera menyelesaikan TLHP BPK dan Itjen 2. Melaporkan bukti setor TLHP yg telah diterima dari satker ke Itjen tembusan ke Setjen
				B12: 1. Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen 2. Laporan evaluasi	B12: 1. Laporan TLHP 2. Bukti penyetoran 3. Laporan evaluasi	B12: 1. Membuat surat ke upt untuk segera menyelesaikan TLHP BPK dan Itjen 2. Melaporkan bukti setor TLHP yg telah

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						diterima dari satker ke Itjen tembusan ke Setjen 3. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan TLHP BPK dan Itjen
4.	Optimalisasi Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis teknologi informasi	Terlaksananya Pelaporan LHKASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis teknologi informasi	Tercapainya pelaporan LHKASN 100%	B03: 1. Persiapan evaluasi pelaporan LHKASN 2. Evaluasi laporan LHKASN triwulan I	B03: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan I	B03: 1. Persiapan evaluasi pelaporan LHKASN a. Mengupdate jumlah pegawai yang wajib LHKASN didalam aplikasi LHKASN

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>b. Membuat surat ke upt untuk memastikan seluruh wajib lapor LHKASN telah melaporkan</p> <p>c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyelesaian Pelaporan LHKASN setiap Pegawai pada Jajaran Kanwil Jateng</p> <p>2. Evaluasi laporan LHKASN triwulan I</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						a. Meng-evaluasi pelaksanaan penyelesaian pelaporan LHKASN 100% Pelaporan LHKASN setiap Pegawai pada Jajaran Kanwil Jateng
				B06: Evaluasi laporan LHKASN triwulan II	B06: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan II	B06: Membuat laporan LHKASN triwulan II
				B09: Evaluasi laporan LHKASN triwulan III	B09: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan III	B09: Membuat laporan LHKASN triwulan III
				B12: Evaluasi laporan LHKASN	B12:	B12:

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				triwulan IV dan Kompilasi	Laporan evaluasi LHKASN Triwulan IV dan Kompilasi	Membuat laporan LHKASN triwulan IV
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI						
5.	Peningkatan citra positif Kementerian Hukum dan HAM	Tersebar nya informasi kementerian Hukum dan HAM secara terstruktur, masif, dan sistematis	Informasi Kementerian Hukum dan HAM disebarkan di seluruh media sosial (FB, Instagram,dan Twitter) seluruh Satuan Kerja	B03: Penyampaian data akun media sosial (FB, Instagram, dan Twitter) seluruh satuan kerja di wilayah yang sudah terkoneksi dengan media sosial Kementerian Hukum dan HAM ke Sekretariat Jenderal	B03: Surat penyampaian akun media sosial (FB, Instagram,dan twitter) dan SK admin pengelola Satuan Kerja ke Sekretariat Jenderal cq Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama	B03 : 1. Membuat surat ke UPT perihal penyampaian Akun Medsos UPT kepada Kantor Wilayah dan membuatkan SK Admin dari pengelola Medsos tsb. 2. Khusus Kantor Wilayah membuat SK Ka-kanwil tentang penunjukan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>admin Medsos.</p> <p>3. Membuat surat ke Setjen Cq. Biro Humas hal penyampaian Akun Medsos UPT dan Medsos Kantor Wilayah.</p> <p>4. Melaksanakan penguatan kompetensi di Kantor Wilayah kepada pegawai yang terdapat didalam SK baik di Kantor Wilayah maupun UPT</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>agar dapat produktif dalam memberikan informasi, cerdas dalam bermedsos dan membuat berita serta penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>5. Khusus laman, memberikan pendampingan proses pengalihan dari laman yang belum berdomain kemenkumham.go.id menjadi berdomain</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						kemenkumham.go.id
				B06: Menyebarkan 10 (sepuluh) narasi tunggal dari Biro Humas Hukum dan Kerja sama di seluruh media sosial (FB, Instagram, dan twitter) kantor wilayah dan UPT	B06: Laporan penyebaran narasi tunggal di media sosial (FB, Instagram, dan twitter) seluruh Satuan Kerja	B06 : 1. Membuat surat kepada UPT untuk menyebarluaskan 10 narasi tunggal dari Humas di Medsos masing-masing UPT dan mengirimkan laporan ke Kantor Wilayah. 2. Menyebarluaskan narasi tunggal di Kantor Wilayah. 3. Membuat laporan penyebaran narasi tunggal

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>di seluruh Satuan Kerja.</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada Satuan Kerja yang kurang dari 10 penyebaran narasi tunggal untuk dikirimkan pemberitahuan surat.</p>
				<p>B09: Menyebarkan 10 (sepuluh) narasi tunggal dari Biro Humas Hukum dan Kerja sama di seluruh media sosial (FB, Instagram, dan twitter) kantor wilayah dan UPT</p>	<p>B09: Laporan penyebaran narasi tunggal di media sosial (FB, Instagram, dan twitter) seluruh Satuan Kerja</p>	<p>B09 :</p> <p>1. Membuat surat kepada UPT untuk menyebarluaskan 10 narasi tunggal dari Humas di Medsos masing-masing UPT dan mengirimkan laporan ke</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						Kantor Wilayah. 2. Menyebarluaskan narasi tunggal di Kantor Wilayah. 3. Membuat laporan penyebaran narasi tunggal di seluruh Satuan Kerja. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada Satuan Kerja yang kurang dari 10 penyebaran narasi tunggal untuk dikirimkan pemberitahuan surat.
				B12:	B12:	B12 : 1. Membuat surat kepada

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Menyebarkan 5 (lima) narasi tunggal dari Biro Humas Hukum dan Kerja sama di seluruh media sosial (FB, Instagram, dan twitter) kantor wilayah dan UPT	Laporan penyebaran narasi tunggal di media sosial (FB, Instagram, dan twitter) seluruh Satuan Kerja	<p>UPT untuk menyebarluaskan 5 narasi tunggal dari Humas di Medsos masing-masing UPT dan mengirimkan laporan ke Kantor Wilayah.</p> <p>2. Menyebarluaskan narasi tunggal di Kantor Wilayah.</p> <p>3. Membuat laporan penyebaran narasi tunggal di seluruh Satuan Kerja.</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada Satuan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>Kerja yang kurang dari 5 penyebaran narasi tunggal untuk dikirimkan pemberitahuan surat.</p> <p>5. Pemberian penghargaan pada HDKD bagi UPT yang terbaik 1-3 yang paling aktif dalam penyebaran narasi tunggal Biro Humas dan informasi di medsos.</p>
6.	Peningkatan Disiplin pegawai terhadap kehadiran	Pegawai mematuhi aturan jam kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Disiplin sudah sesuai Peraturan yang berlaku 2. Presentasi pegawai yang Tidak Masuk 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil rekon 2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat 	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan integrasi Simpeg dengan absensi seluruh Satker Jawa Tengah.

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
			Kerja atauTerlambat tanpa keterangan dibawah 15% untuk masing-masing unit	hukuman disiplin (hukdis) dengan Itjen	3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat surat edaran ke UPT untuk menegakkan PP 53 tahun 2010 dan peraturan pelaksanaanya serta melaporkan secara pertriwulan pegawai yang tidak masuk dan terlambat. 3. Membuat surat edaran yang mengatur tentang reward dan punishmen pegawai. 4. Membuat aplikasi absensi apel pagi dan sore melalui

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>penggunaan barcode pada kartu pegawai.</p> <p>5. Membentuk Satgas Internal sebagai unsur pelaksana surat edaran ketiga.</p> <p>6. Meng-internaslisasi tata nilai pasti, komitmen ZI, Kode Etik dan hal lainnya pada setiap apel pagi yang disampaikan oleh Pimti dan administrator secara bergilir.</p> <p>7. Membuat papan informasi pegawai yang memuat pegawai teladan dan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pegawai yang tidak disiplin baik dalam jam kerja dan berpakaian.</p> <p>8. Melaksanakan rekonsiliasi data hukuman disiplin (hukdis) dengan Itjen Triwulan I Tahun 2020</p> <p>9. Menyusun laporan evaluasi tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai pada Jajaran Kanwil Jateng Triwulan I Tahun 2020</p>
				<p>B06:</p> <p>1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin</p>	<p>B06:</p> <p>1. Data hasil rekon</p>	<p>B06 :</p> <p>1. Melaksanakan rekonsiliasi dan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				kehadiran pegawai Kanwil Kemenkumham 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukdis dengan Itjen	2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat 3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai	mengevaluasi tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai pada Jajaran Kanwil Jateng Triwulan II Tahun 2020 2. Melaksanakan rekonsiliasi data hukuman disiplin (hukdis) dengan Itjen Triwulan II Tahun 2020 3. Menyusun laporan evaluasi tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai pada Jajaran Kanwil Jateng Triwulan II Tahun 2020

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: 1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai Kanwil Kemenkumham 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukdis dengan Itjen	B09: 1. Data hasil rekon 2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat 3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai	B09 : 1. Melaksanakan rekonsiliasi dan mengevaluasi tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai pada Jajaran Kanwil Jateng Triwulan III Tahun 2020 2. Melaksanakan rekonsiliasi data hukuman disiplin (hukdis) dengan Itjen Triwulan III Tahun 2020 3. Menyusun laporan evaluasi tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai pada

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						Jajaran Kanwil Jateng Triwulan III Tahun 2020
				B12: 1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai Kanwil Kemenkumham 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukdis dengan Itjen	B12: 1. Data hasil rekon 2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat 3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai	B12 : 1. Melaksanakan rekonsiliasi dan mengevaluasi tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai pada Jajaran Kanwil Jateng Triwulan IV Tahun 2020 2. Melaksanakan rekonsiliasi data hukuman disiplin (hukdis) dengan Itjen Triwulan IV Tahun 2020 3. Menyusun laporan evaluasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai pada Jajaran Kanwil Jateng Triwulan IV Tahun 2020
7.	Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	B03: 1. Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA. 2019 2. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester II T.A. 2019 sesuai dengan SAP	B03: Laporan Keuangan Semester II T.A. 2019	B03 : 1. Membuat SK Tim Pengelola SAI; 2. Melakukan Rekonsiliasi laporan keuangan semester II TA. 2019 untuk tingkat Wilayah; 3. Menyusun Laporan Keuangan Semester II TA. 2019.
				B06:	B06:	B06 : 1. Melakukan Rapat

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020	Notula Rapat Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020	<p>Persiapan Penyusunan Laporan keuangan Semester I T.A 2020;</p> <p>2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan di satuan kerja dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2020.</p>
				B09: Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020 sesuai dengan SAP	B09: Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020	B09 : 1. Melakukan Rekonsiliasi laporan keuangan semester I TA. 2020 untuk tingkat Wilayah;

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						2. Menyusun Laporan Keuangan Semester I TA.2020.
				B12: Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulan III T.A. 2020 sesuai dengan SAP	B12: Laporan Keuangan Triwulan III T.A. 2020	B12 : 1. Menyusun Laporan Keuangan Triwulan III TA.2020. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan di satuan kerja dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA. 2020.
8.	Implementasi SIPaSTIKU	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Seluruh Kantor Wilayah menggunakan SIPaSTIKU	B03: Laporan Pelaksanaan PBJ per bulan (Januari-	B03:	B03 : 1. Membentuk SK sekretariat

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		(PBJ) berdasarkan Dirsbursement Plan melalui SIPaSTIKU di Kantor Wilayah		Maret) pada seluruh satker di Kantor Wilayah	<i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU	<p>UKPBJ perwakilan.</p> <p>2. Sekrariat UKPJB memastikan seluruh KPA satker mengunggah ADK RAKKL ke dalam aplikasi Sirup dan seluruh PPK satker telah meng-indtifikasi jenis pengadaan dari setiap komponen ADK RKAKL dke dalam LPSE.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi SIPaSTIKU ke sekretriati UKPBJ perwakilan.</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>4. UKPBJ melakukan perivifikasi terhadap dokumen permohonan pembentukan pejabat pengadaan dan Tim Pokja pengadaan dan megupload data ke SIPaSTIKU.</p> <p>5. Melakukan menyusun laporan pengadaan Pradipa sampai dengan maret 2020 ke aplikasi SIPaSTIKU.</p>
				B06:	B06:	B06 : Melakukan Monitoring

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Laporan Pelaksanaan PBJ per bulan (April-Juni) pada seluruh satker di Kantor Wilayah	<i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU	penyusun laporan Pengadaan barang dan jasa april-juni
				B09: Laporan Pelaksanaan PBJ per bulan (Juli-September) pada seluruh satker di Kantor Wilayah	B09: <i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU	B09 : Melakukan Monitoring penyusun laporan Pengadaan barang dan jasa juli-september
				B12: Laporan pelaksanaan PBJ per bulan (Oktober-Desember) pada seluruh satker di Kantor Wilayah	B12: <i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU	B12 : Melakukan Monitoring penyusun laporan Pengadaan barang dan jasa oktober-desember
9.	Mewujudkan Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM berbasis	Terkoordinasinya pengembangan TI Kemenkumham baik dalam bidang Infrastruktur maupun aplikasi dalam sebuah	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi di unit utama dan Kanwil tidak tumpang tindih atau duplikasi untuk	B06: Evaluasi TI di Kantor Wilayah	Laporan evaluasi	B06 : 1. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan penjelasan tentang Grand

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	Teknologi Informasi (TI)	<i>grand design</i> TI Kementerian	meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran TI Kemenkumham			<p>Desain TI Kementerian.</p> <p>2. Membentuk Tim untuk mempelajari dan mengimplementasikan di Kanwil.</p> <p>3. Membuat surat edaran ke UPT dalam rangka menginventarisir TI yang digunakan masing-masing UPT agar dapat dilaporkan ke Kantor Wilayah.</p> <p>4. Mengadakan rapat di Kanwil untuk menyusun peta penggunaan TI</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>baik di UPT maupun di Kanwil.</p> <p>5. Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan terhadap aplikasi yang sudah ada, dan yang akan dikembangkan dengan men-sinkronkan Grand Desain TI Kementerian.</p>
				<p>B09: Postur Anggaran TI tahun 2021 di Kantor Wilayah</p>	<p>RKA-KL Teknologi Informasi Kantor Wilayah</p>	<p>B09 :</p> <p>1. Menyelenggarakan rapat pembahasan kebutuhan anggaran dengan merujuk hasil evaluasi pada B-06.</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						2. Menyusun Postur Anggaran berupa RKAKL TI Kantor Wilayah. 3. Mengajukan usulan anggaran kebutuhan Teknologi Informasi kepada Sekjen.
10.	Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> pada Kantor Wilayah dan UPT	1. Terlaksananya Internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> pada Kantor Wilayah dan UPT Kemenkumham	90% pegawai Kantor Wilayah dan UPT telah mendapatkan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i>	B03: Tahap persiapan : 1. Pedoman pelaksanaan Kemenkumham <i>Corporate University</i> 2. Penetapan peserta Internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> 3. Penjadwalan pelaksanaan	B03: 1. Pedoman 2. SK Peserta Internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> 3. Jadwal pelaksanaan Internalisasi Kemenkumham	B03 : 1. Melakukan komunikasi/ koordinasi dengan BPSDM Kumham tentang corporate University dan bagaimana implementasi UPT.

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				internalisasi <i>Corporate University</i>	<i>Corporate University</i>	<p>2. Mengadakan rapat menyusun Tim yang akan membahas penyusunan pedoman Corporate University, yang didalamnya memuat mekanisme pelaksanaan, jadwal, peserta serta kelengkapan yang diperlukan.</p> <p>3. Mengadakan rapat persiapan pelaksanaan internalisasi corporate university yang menghasilkan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>jadwal, peserta dan pemberitahuan pelaksanaan internalisasi</p> <p>4. Membuat Video tentang Corporate University.</p>
				<p>B06: Pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> bagi pegawai Kantor Wilayah</p>	<p>B06: Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> bagi pegawai Kantor Wilayah</p>	<p>B06 :</p> <p>1. Melaksanakan internalisasi Kumham Corporate University bagi pegawai Kantor Wilayah., ka.upt dan keresidanan semarang, pekalongan dan banyumas melalui klasikal di kanim dan UPT secara mentoring dgn</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>dilengkapi video</p> <p>dilengkapi video (1.900 pegawai)</p> <p>2. Melakukan evaluasi pemahaman internalisasi melalui Post test online Corpu , dan penyusunan laporan</p>
				<p>B09: Pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> pada Kepala dan pegawai UPT</p>	<p>B09: Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> bagi Kepala dan pegawai UPT</p>	<p>B09 :</p> <p>1. Melaksanakan internalisasi Kumham Corporate University bagi keresidanan pati, kedu dan Surakarta melalui klasikal di kanim dan upt dan dilengkapi</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						video (1.275 pegawai) 2. Melakukan evaluasi pemahaman internalisasi melalui Post test online Corpu , dan penyusunan laporan
				B12: Evaluasi internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i>	B12: Hasil evaluasi yang diinput ke CBHRIS	B12 : Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> dan menginput CBHRIS.
		2. Pelaksanaan kegiatan <i>Coaching</i> dan Mentoring Indikator Kinerja Pelaksanaan	90% pejabat administrator dan Ka. UPT di Kanwil memahami Indikator	B03: 1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan <i>Coaching, coachee</i> dan Mentoring	B03: 1. Daftar hadir, dokumentasi dan notulensi	B03 : 1. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		Anggaran (IKPA) bagi pejabat administrator dan Ka. UPT di Kanwil	Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	2. Penetapan <i>Coaching, coachee</i> dan Mentoring	2. SK Penetapan <i>Coach, Coachee</i> dan Mentor	<p>Coaching, coachee dan Mentoring tentang IKPA</p> <p>2. Membuat video infografis tentang IKPA sebagai pelengkapan pelaksanaan Coaching Coachee dan Mentoring.</p> <p>3. Melatih teknik menjadi coach dan mentor kepada pegawai kanwil yang sudah sangat memahami tentang IKPA</p> <p>4. Membuat SK penetapan Coach, Coachee dan Mentor</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: Pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring bagi pegawai pejabat administrator di Kanwil	B06: Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring	B06 : 1. Melakukan pre test ttg IKPA dilanjutkan pelaksanaan kegiatan coaching dan mentoring bagi pegawai, pejabat administrator kanwil dan upt serta ka. UPT (85 orang) 2. Melakukan post test sebagai evaluasi
				B09: Pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring bagi pegawai Ka. UPT	B09: Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring	B09 : 1. Melakukan pre test ttg ikpa dilanjutkan pelaksanaan kegiatan coaching pengelola

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						keuangan kanwil dan UPT (153 orang) dilakukan di 6 keresidanan (menambah target) 2. Melakukan post test
				B12: 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Evaluasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring di Kanwil	B12: 1. <i>Capture</i> nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Hasil evaluasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring di Kanwil yang di input ke dalam CBHRIS	B12 : 1. Meng capture nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring di Kanwil. 3. Melakukan monitoring

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>kemampuan pegawai terkait pemahamannya tentang IKPA secara karesidenan.</p> <p>4. Menginput laporan Coaching dan Mentoring ke CBHRIS</p>
11.	Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019	90% proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 yang ditindaklanjuti di Kanwil	B03: Inventaris data proyek perubahan alumni diklat PIM III dan IV tahun 2019 di Kanwil	B03: Daftar proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 di Kanwil	B03 : 1. Membentuk Tim yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 yang

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>ditindaklanjuti di Kanwil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Merekap data alumni PIM III dan IV serta daftar proyek perubahannya 3. Mengadakan rapat persiapan pelaksanaan monitoring dan menyusun laporan. 4. Membuat surat edaran tentang jadwal pelaksanaan monitoring kepada alumni PIM III dan IV.

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni diklat PIM III dan IV di Kanwil	B06: 1. Hasil kegiatan diinput ke CBHRIS 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni diklat PIM III dan IV tahun 2019 di Kanwil	B06 : 1. Melaksanakan monitoring dan menginput hasil kegiatan Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 yang ditindaklanjuti di Kanwil 2. Menyusun laporan hasil kegiatan Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni Diklat

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						PIM III dan IV tahun 2019 yang ditindaklanjuti di Kanwil
				B09: Memberikan rekomendasi proyek perubahan yang dapat diimplementasikan	B09: Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala BPSDM	B09 : 1. Mengadakan rapat membahas rekomendasi proyek perubahan yang ditujukan kepada Kepala BPSDM. 2. Menyusun surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala BPSDM

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM						
12.	Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisan, pemantapan, dan pembulatan konsepsi produk hukum daerah	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisan, pemantapan, dan pembulatan konsepsi produk hukum daerah	Terlaksananya pengharmonisan, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada produk hukum daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada masing-masing Kanwil Kemenkumham	B03: Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	B03: Laporan Koordinasi dengan melampirkan: 1. SK Zonasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan 2. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prov/Kab/Kota) 3. Daftar Hadir, Notula, dan Dokumentasi	B03: 1. Pembentukan Tim Perancang 2. Melakukan sosialisasi UU 15/2019 di divisi Yankumham 3. Melakukan koordinasi dengan Ditjen PP tentsng penetapan SK Zonasi Perancang 4. Membuat surat ttg permintaan propemperda , penyampaian kewajiban harmonisasi berdasarkan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>UU Nomor 15 th 2019 dan SK Zonasi Perancang serta</p> <p>5. Melakukan koordi nasi dengan Sekretariat Daerah di Kabupaten/Ko ta dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah oleh masing masing perancang sesuai zonasi</p> <p>6. Melakukan Rapat internal membahas tentang Program</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						Pembentukan Peraturan Daerah di 35 Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2020
				B06: Terharmonisasinya Produk hukum daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah berdasarkan surat selesai pengharmonisasian dari Kepala Kantor Wilayah ke Pemerintah Daerah	B06: Laporan yang melampirkan surat permohonan pengharmonisasian, surat selesai harmonisasi, rancangan peraturan daerah, notula rapat, daftar hadir, dokumentasi	B06: 1. Melakukan penguatan kepada perancang dengan narasumber dari perguruan tinggi dan pemda 2. Melakukan rapat internal sesuai dengan pokja yg terdapat dalam substansi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						raperda sebelum memenuhi undangan atau melakukan harmonisasi ke pemda 3. Melakukan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Ko ta di Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat permohonan, membuat daftar hadir,

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>menyusun notula, melampirkan dokumentasi dan menyusun surat selesai</p> <p>4. Menyusun laporan pelaksanaan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan II</p>
				B09: Terharmonisasinya Produk hukum daerah prakarsa Pemerintah	B09: Laporan yang melampirkan surat permohonan	B09: 1. Melakukan rapat internal sesuai dengan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah berdasarkan surat selesai pengharmonisasian dari Kepala Kantor Wilayah ke Pemerintah Daerah	pengharmonisasian, surat selesai harmonisasi, rancangan peraturan daerah, notula rapat, daftar hadir, dokumentasi	pokja yg terdapat dalam substansi raperda sebelum memenuhi undangan atau melakukan harmonisasi ke pemda 2. Melakukan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						surat permohonan, membuat daftar hadir, menyusun notula, melampirkan dokumentasi dan menyusun surat selesai 3. Menyusun laporan pelaksanaan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan III

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>B12: Menyusun laporan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada produk hukum daerah dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>B12: Laporan pengharmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi produk hukum daerah</p>	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat internal sesuai dengan pokja yg terdapat dalam substansi raperda sebelum memenuhi undangan atau melakukan harmonisasi ke pemda 2. Melakukan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>Tengah dan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat permohonan, membuat daftar hadir, menyusun notula, melampirkan dokumentasi dan menyusun surat selesai.</p> <p>3. Menyusun laporan pelaksanaan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						Tengah dan Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan IV
13.	Menciptakan kondisi/iklim ramah investasi yang antisipatif terhadap adanya tindak pidana pencucian uang	Implementasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) di Wilayah	Meningkatnya jumlah pelapor Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) di Wilayah.	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim 2. Rapat persiapan awal 3. Pemetaan data Pemilik Manfaat di wilayah 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim 2. Laporan Persiapan awal (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi) 3. Matriks data pelaporan Pemilik Manfaat di wilayah 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim 2. Rapat persiapan awal 3. Pemetaan data Pemilik Manfaat di wilayah
				<p>B06:</p> <p>Diseminasi kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah Periode I</p>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tim 2. Laporan Diseminasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi) 	<p>B06:</p> <p>Diseminasi kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah Periode I</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: Diseminasi kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah Periode II	B09: 1. Laporan Tim 2. Laporan Diseminasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)	B09: Diseminasi kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah Periode II
				B12: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Diseminasi	B12: 1. Laporan Evaluasi 2. Matriks Data pelaporan Pemilik Manfaat di wilayah (setelah diseminasi)	B12: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Diseminasi
14.	Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten	Tercapainya pemahaman masyarakat tentang pendaftaran/pengesa an Badan Usaha Berbadan Hukum di Wilayah	Meningkatnya pendaftaran/pengesa han Badan Usaha Berbadan Hukum yang dapat mendukung peningkatan investasi di Wilayah	B03: 1. Rapat Persiapan Awal 2. Pendataan jumlah badan hukum di Wilayah	B03: 1. Laporan Persiapan awal (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi)	B03: 1. Rapat persiapan awal 2. Data Jumlah Badan Hukum yang terdapat di Wilayah

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					2. Matriks Data Jumlah Badan Hukum di Wilayah	
				B06: <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) tentang Pedoman pendaftaran/ pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum Periode I	B06: Laporan FGD (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)	B06: FGD tentang Pedoman pendaftaran/ pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum Periode I
				B09: <i>Focus Group Discussion</i> tentang Pedoman pendaftaran/ pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum Periode II	B09: Laporan FGD (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)	B09: FGD tentang Pedoman pendaftaran/ pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum Periode II
				B12: Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i>	B12: Laporan Evaluasi	B12: Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan FGD

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
15.	Meningkatkan pengawasan notaris melalui pengenalan pengguna jasa notaris untuk menghindari praktik pencucian uang	Tercapainya pemahaman Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah	Meningkatnya pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah	B03: Rapat Persiapan Awal	B03: Laporan Persiapan awal (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi)	B03: Rapat Persiapan Awal
				B06: Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah Periode I	B06: Laporan Rapat Koordinasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)	B06: Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah Periode I
				B09: Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah Periode II	B09: Laporan Rapat Koordinasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)	B09: Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						oleh Notaris di Wilayah Periode II
				B12: Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD	B12: Laporan Evaluasi	B12: Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD
16.	Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual (KI)	Kantor Wilayah mampu memetakan potensi KI di wilayahnya masing-masing	Terbentuknya Peta Potensi Kekayaan Intelektual sebagai dasar diseminasi	B03: Koordinasi dengan DJKI mengenai rezim KI yang akan diinventarisasi	B03: 1. Surat Penugasan 2. Laporan koordinasi dengan DJKI untuk menentukan penyusunan inventarisasi potensi KI yang ada di Kabupaten/Kota	B03: 1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentang rezim KI 2. membuat surat pemberitahuan kepada PT yang memiliki

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>Klinik (UNDIP dan UNNES) serta pemda mengenai rezim Kekayaan Intelektual yang akan diinventarisasi</p> <p>3. Menyusun laporam koordinasi</p>
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di wilayah 2. Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi KI di wilayah 	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penugasan 2. Laporan Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di kabupaten/kota 	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat penugasan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau perguruan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					3. Laporan kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota sesuai dengan peta potensi	tinggi setempat terkait dengan potensi KI di wilayah 2. melaksanakan rapat persiapan dan Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi Kekayaan Intelektual di wilayah 3. menyusun laporan koordinasidgn stakeholder dan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi KI

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: 1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di wilayah 2. Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi KI di wilayah	B09: 1. Surat Penugasan 2. Laporan Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota 3. Laporan kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota sesuai dengan peta potensi	B09: 1. Membuat surat penugasan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau perguruan tinggi setempat terkait dengan potensi KI di wilayah 2. melaksanakan rapat persiapan dan Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>Kekayaan Intelektual di wilayah</p> <p>3. Menyusun laporan koordinasidgn stakeholder dan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi KI</p>
				<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di wilayah 2. Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi KI di wilayah 3. Tersedianya Peta Potensi KI di wilayah 	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penugasan 2. Laporan Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota 3. Laporan kegiatan diseminasi 	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat penugasan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau perguruan tinggi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota sesuai dengan peta potensi 4. Dokumen Peta Potensi KI di wilayah	setempat terkait dengan potensi KI di wilayah 2. Melaksanakan rapat persiapan dan Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi Kekayaan Intelektual di wilayah 3. Menyusun laporan koordinasi dgn stakeholder dan laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi KI 4. Mengadakan rapat

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>penyusunan pemetaan potensi Kekayaan Intelektual di Wilayah Jawa Tengah</p> <p>5. Menyusun Peta potensi KI di wilayah</p>
17.	Meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui peningkatan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan komunitas-komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Permohonan KI yang diajukan dari Provinsi/Kabupaten /Kota 2. Peningkatan jumlah data di Kekayaan Intelektual Komunal pada pusat data nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Jumlah Permohonan KI di Provinsi/Kabupaten/ Kota 2. Meningkatnya Jumlah inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten/ Kota/Provinsi 	<p>B03: Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan komunitas-komunitas dalam mempersiapkan <i>draft</i> Perjanjian Kerjasama (PKS) meningkatkan permohonan pendaftaran KI dan inventarisasi KIK</p>	<p>B03: <i>Draft</i> PKS Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan komunitas-komunitas</p>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun jaringan dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Dinas terkait) Kabupaten / Kota, UPT, PT, atau swasta

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						2. Meng-inventarisir potensi terjalannya kerjasama dari hasil membangun jaringan 3. Melaksanakan rapat penyusunan Draft PKS dengan pemda, UPT, PT atau swasta
				B06: 1. Penandatanganan PKS 2. Pelaksanaan PKS/pendampingan	B06: 1. PKS yang sudah ditandatangani 2. Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	B06: 1. Penadatangan PKS 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						dengan steakholder 3. Membuat laporan pelaksanaan PKS
				B09: Pelaksanaan PKS/pendampingan	B09: Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	B09: Membuat laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan stakeholder
				B12: 1. Pelaksanaan PKS/pendampingan 2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PKS	B12: 1. Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi	B12: 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan steakholder 2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						dan rapat evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan
18.	Optimalisasi pemetaan potensi Pelanggaran kekayaan Intelektual dan Pengawasan Indikasi Geografis (IG) di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi daerah berpotensi terdapat pelanggaran kekayaan intelektual Menjamin konsistensi mutu produk IG 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya peta Potensi pelanggaran KI Terjaminnya konsistensi mutu produk IG sesuai dengan buku deskripsi IG 	<p>B03: Koordinasi Kantor Wilayah dengan aparat penegak hukum untuk menentukan indikator wilayah yang berpotensi terdapat pelanggaran KI</p> <p>B06: 1. Pelaksanaan kegiatan terkait Penyusunan <i>Draft Database</i> Inventarisasi wilayah</p>	<p>B03: Laporan hasil Koordinasi</p> <p>B06: 1. Laporan Pelaksanaan kegiatan terkait Penyusunan <i>Draft Database</i></p>	<p>B03: Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menentukan indikator wilayah yang berpotensi terdapat pelanggaran kekayaan intelektual</p> <p>B06: 1. Melaksanakan rapat penyusunan draft database inventarisasi</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				berpotensi pelanggaran KI 2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah / Masyarakat Pengguna Indikasi Geografis (MPIG)	Inventarisasi wilayah berpotensi terdapat pelanggaran KI 2. Laporan koordinasi	wilayah berpotensi pelanggaran KI dengan mengundang Pihak kepolisian dan PPNS KI 2. Menyusun laporan pelaksanaan penyusunan draft database inventarisasi wilayah berpotensi terdapat pelanggaran KI 3. Melakukan rapat persiapan untuk kegiatan koordinasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>dengan Pemerintah daerah dan Masyarakat Pengguna Indikasi Geografis</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah / Masyarakat pengguna Indikasi Geografis</p>
				B09: Inventarisasi wilayah berpotensi terjadinya pelanggaran KI	B09: Laporan koordinasi dengan aparaturnegak hukum di wilayah	B09: 1. Melaksanakn rapat penyusunan draft database inventarisasi wilayah berpotensi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pelanggaran KI dengan mengundang Pihak kepolisian dan PPNS KI</p> <p>2. Menyusun laporan koordiansi pelaksanaan penyusunan draft database inventarisasi wilayah berpotensi terdapat pelanggaran KI</p>
				B12: Peta wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran KI	B12: Laporan ke DJKI terkait <i>Database</i> wilayah yang berpotensi terdapat pelanggaran KI	B12: 1. Melaksanakan rapat penyusunan peta wilayah berpotensi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						terjadi pelanggaran KI 2. Menyusun laporan
19.	Meningkatkan Koordinasi dengan <i>Stakeholders</i> Dalam Rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM	Terlaksananya penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh instansi terkait/pemangku kepentingan	Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh instansi terkait/pemangku kepentingan	B03: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	B03: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/pemangku kepentingan; 2. Laporan penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM	B03: 1. Membuat telaahan terhadap pengaduan, 2. Melaksanakan rapat dengan Stakeholders terkait sebagai bahan rekomendasi 3. Apabila rekomendasi adalah pelanggaran hukum maka akan diserahkan ke instansi yg berwenang

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>namun jika ada pelanggaran ham maka terlapor akan direkomendasikan untuk melaksanakan HAM yang dilanggar</p> <p>4. Menyusun laporan triwulan kegiatan Pelayanan Komunikasikan Masyarakat yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal HAM</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>B06: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan I</p>	<p>B06: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/ pemangku kepentingan; 2. Laporan penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM</p>	<p>B06: 1. Membuat telaahan terhadap pengaduan, 2. Melaksanakan rapat dengan Stakeholders terkait sebagai bahan rekomendasi 3. apabila rekomendasi adalah pelanggaran hukum maka akan diserahkan ke instansi yg berwenang namun jika ada pelanggaran ham maka</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>terlapor akan direkomendasikan untuk melaksanakan HAM yang dilanggar</p> <p>4. Menyusun laporan triwulan kegiatan Pelayanan Komunikasika i Masyarakat yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal HAM</p>
				<p>B09: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi</p>	<p>B09: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/</p>	<p>B09: 1. Membuat telaahan terhadap pengaduan,</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan II	pemangku kepentingan; 2. Laporan penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM	2. Melaksanakan rapat dengan Stakeholders terkait sebagai bahan rekomendasi 3. Apabila rekomendasi adalah pelanggaran hukum maka akan diserahkan ke instansi yg berwenang namun jika ada pelanggaran ham maka terlapor akan direkomendasi kan untuk melaksanakan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						HAM yang dilanggar 4. Menyusun laporan triwulan kegiatan Pelayanan Komunikasikas i Masyarakat yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal HAM
				B12: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan III	B12: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/ pemangku kepentingan 2. Laporan penanganan	B12: 1. Membuat telaahan terhadap pengaduan, 2. Melaksanakan rapat dengan Stakeholders terkait sebagai

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					dugaan pelanggaran/permasalahan HAM	bahan rekomendasi 3. Apabila rekomendasi adalah pelanggaran hukum maka akan diserahkan ke instansi yg berwenang namun jika ada pelanggaran ham maka terlapor akan direkomendasikan untuk melaksanakan HAM yang dilanggar 4. Menyusun laporan triwulan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal HAM
20.	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah presiden	Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah presiden	Pemerintah Daerah telah melaporkan Aksi Hak Asasi Manusia	B03: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM 2019 Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Bimtek bagi pemerintah daerah (provinsi, kab/kota) tentang Aksi HAM Daerah 3. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM	B03: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM 2019 2. Laporan Bimtek 3. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B03: 1. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan Aksi HAM 2019 sekaligus persiapan pelaksanaan Aksi HAM 2020 2. Melaksanakan rapat persiapan bimtek dan melaksanakan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota		<p>Bimtek serta menyusun laporan Rapat Kerja Aksi HAM</p> <p>3. Mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Aksi HAM B03</p> <p>4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang masih mendapatkan nilai kuning selama Aksi HAM 2019</p>
				<p>B06:</p> <p>1. Evaluasi capaian pelaksanaan</p>	<p>B06:</p>	<p>B06:</p> <p>1. Melaksanakan rapat evaluasi</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>pelaporan Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota</p> <p>2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B04</p> <p>2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota</p>	<p>pelaksanaan Aksi HAM 2019 sekaligus persiapan pelaksanaan Aksi HAM 2020</p> <p>2. Melaksanakan rapat persiapan bimtek dan melaksanakan Bimtek serta menyusun laporan Rapat Kerja Aksi HAM</p> <p>3. Mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Aksi HAM B03</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang masih mendapatkan nilai kuning selama Aksi HAM 2019
				B09: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B09: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B08 2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B09: 1. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan Aksi HAM 2019 sekaligus persiapan pelaksanaan Aksi HAM 2020 2. Melaksanakan rapat persiapan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>bimtek dan melaksanakan Bimtek serta menyusun laporan Rapat Kerja Aksi HAM</p> <p>3. Mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Aksi HAM B03</p> <p>4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang masih mendapatkan nilai kuning selama Aksi HAM 2019</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12: 1. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B12 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B12: 1. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B12	B12: 1. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan Aksi HAM 2019 sekaligus persiapan pelaksanaan Aksi HAM 2020 2. Melaksanakan rapat persiapan bimtek dan melaksanakan Bimtek serta menyusun laporan Rapat Kerja Aksi HAM 3. Mengirimkan surat pemberitahuan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pelaksanaan Aksi HAM B03</p> <p>4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang masih mendapatkan nilai kuning selama Aksi HAM 2019</p>
21.	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli HAM	B03: 1. Pemetaan Kabupaten Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah Mendapatkan Predikat dan Yang Belum Pernah Mengusulkan)	B03: 1. Laporan hasil pemetaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah Mendapatkan Predikat dan Yang	B03: 1. Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan KKP HAM Tahun 2019 dan persiapan penilaian KKP HAM Tahun 2020 serta menyusun

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				2. Bimtek Permenkumham tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM	Belum Pernah Mengusulkan) 2. Laporan Bimtek	laporan hasil kegiatan yang dikirimkan kepada Ditjen HAM 2. Melaksanakan rapat persiapan bimtek 3. Melaksanakan bimtek 4. Menyusun laporan
				B06: 1. Notifikasi bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota tentang pelaporan indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Pemeriksaan data indikator kriteria	B06: 1. Surat notifikasi 2. Berita acara pemeriksaan	B06: 1. Melaksanakan verifikasi atas data dukung KKP HAM yang telah diterima dari pemda 2. Melaksanakan input data atas data dukung KKP

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM		HAM yang telah terverifikasi 3. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan lembaran pengesahan dari Sekda Provinsi sebelum seluruh dokumen di kirim ke ditjen ham
				B09: 1. Pemeriksaan data indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi	B09: 1. Berita acara pemeriksaan	B09: 1. Melaksanakan verifikasi atas data dukung KKP HAM yang telah diterima dari pemda

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM		2. Melaksanakan input data atas data dukung KKP HAM yang telah terverifikasi 3. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan lembaran pengesahan dari Sekda Provinsi sebelum seluruh dokumen di kirim ke ditjen ham
				B12: 1. Notifikasi hasil penilaian kriteria	B12: 1. Surat notifikasi 2. Laporan Evaluasi	B12: 1. Menyusun surat pemberitahu

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Evaluasi pelaksanaan pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM		an pelaksanaan penilaian KKP HAM Tahun 2020 2. Melakukan rapat evaluasi dan menyusun laporan
22.	Mendorong terwujudnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM	Terintegrasinya materi muatan HAM dalam Rancangan Produk Hukum Daerah	Dokumen analisis dan rekomendasi materi muatan HAM dalam Rancangan Produk Hukum Daerah	B03: Pemetaan Rancangan Produk Hukum Daerah dalam Program Legislasi Daerah yang terkait dengan substansi HAM	B03: Dokumen Pemetaan Rancangan Produk Hukum Daerah dalam Program Legislasi Daerah yang terkait dengan substansi HAM	B03: 1. Membentuk SK Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah berprespektif HAM 2. Melaksanakan koordinasi dengan subbidang FPPHD untuk mendapatkan data

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						PROPEMPERD A 35 kab/kota dan Provinsi Jateng 3. Inventarisasi Rancangan Produk Hukum Daerah 35 Kab/Kota bekerjasama dengan Biro Hukum Provinsi
				B06: Analisis Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	B06: Dokumen Analisa Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	B06: Melaksanakan Rapat Identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah bekerjasama dengan Biro Hukum Provinsi yang menghasilkan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						rekomendasi rancangan produk hukum daerah yang akan ditelaah dalam perspektif HAM
				B09: <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	B09: Laporan hasil FGD Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	B09: 1. Mengundang Bagian Hukum Kab/Kota, Pemrakarsa Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Provinsi dan Tim Harmonisasi Hukum Daerah berperspektif HAM 2. Melaksanakan FGD atas rancangan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>produk hukum daerah dari perspektif HAM tindak lanjut inventarisasi dan identifikasi</p>
				<p>B12: Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM</p>	<p>B12: Dokumen Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM</p>	<p>B12: Rapat dengan Bagian Hukum Kab/Kota, Pemrakarsa Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Provinsi dan Tim Harmonisasi untuk menyusun rekomendasi hasil telaahan dari perspektif HAM atas rancangan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						produk hukum daerah
23.	Pembentukan Pos Yankomas di UPT	Terbentuknya Pos dan Petugas Pos Yankomas di seluruh UPT	SK Pembentukan dan Pelaksana Pos Yankomas di seluruh UPT	B03 : Pemetaan Pos Yankomas di Provinsi/Kabupaten/ Kota	B03: Laporan Peta Pos Yankomas	B03: 1. Mengadakan rapat dengan Divisi Pemasarakan dan Divisi Imigrasi untuk menginventarisir UPT yang bersedia mewakili setiap Kab/Kota di 35 Kab/Kota untuk mendirikan Pos Yankomas 2. Menyusun laporan pemetaan Pos Yankomas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: Sosialisasi kepada UPT yang belum membentuk Pos Yankomas	B06: Dokumentasi kegiatan Sosialisasi	B06: Mengundang UPT yang berdasarkan hasil pemetaan belum dibentuk Pos Yankomas untuk dapat disosialisasi pentingnya Pos Yankomas bagi masyarakat
				B09: Pembentukan dan Penguahan Pos Yankomas di UPT	B09: Kompilasi Surat Keputusan Pembentukan Pos Yankomas	B09: Menyusun Surat Keputusan Pembentukan Pos Yankomas
				B12: Bimtek bagi Pelaksana Pos Yankomas	B12: Dokumentasi Pelaksanaan Bimtek	B12: Mengundang petugas UPT yang mendirikan Pos Yankomas untuk melaksanakan Bimtek Yankomas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						untuk pelaksana Pos Yankomas
24.	Terintegrasinya Dokumen Hukum Daerah dalam <i>Database</i> Dokumen Hukum Nasional	Terintegrasinya <i>website</i> Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan, dan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta) dengan portal jdihn.go.id	Bertambahnya jumlah Anggota JDIHN di tingkat daerah yang terintegrasi dengan portal jdihn.go.id	B03: Pemetaan Anggota JDIHN di Tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan, dan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta)	B03: Laporan pemetaan Anggota JDIHN	B03: 1. Membentuk Tim koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIH. 2. Melakukan Koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. 3. Menyiapkan data dukung Laporan pemetaan Anggota JDIHN.
				B06: Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Anggota JDIHN di tingkat daerah	B06: Laporan Pelaksanaan Kegiatan	B06: 1. Membentuk Kepanitian terkait

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						Kegiatan Bimbingan Teknis Anggota JDIH di Daerah 2. Melaksanakan Bimbingan Teknis dengan anggota JDIH di Tingkat Daerah. 3. Menyiapkan data dukung Laporan bimtek
				B09: Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Anggota JDIHN di tingkat daerah	B09: Laporan Hasil Evaluasi	B09: 1. Menginventarisasi kembali masing masing website anggota JDIH, apakah masih ada yang

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						terintegrasi dengan JDIHN 2. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah selaku Koordinator JDIH Provinsi Jawa Tengah agar dapat mendorong anggota JDIH yang belum terinterasi menjadi terinterasi 3. Menyiapkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						Anggota JDIHN di Daerah.
				B12 : Penyampaian Laporan Pengelolaan JDIH Kantor Wilayah sesuai dengan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 melalui aplikasi <i>e-reporting</i> JDIHN	B12: Laporan Pengelolaan JDIH Kantor Wilayah	B12: 1. Menyalin data produk hukum daerah yg sdh terdapat dalam JDIH kab/kota yang sdh terintegrasi dengan JDIHN untuk direupload ke JDIH kantor wilayah 2. Membuat laporan Pengelolaan JDIH Kantor Wilayah melalui Aplikasi e-

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						reporting JDIHN.
25.	Tersedia Perpustakaan Hukum <i>online</i> di setiap kantor wilayah	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan hukum secara <i>online</i> di lingkungan Kantor Wilayah melalui Aplikasi ILDIS / JDIH Kanwil	Pemanfaatan Aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil untuk Layanan Perpustakaan Hukum <i>Online</i> di lingkungan Kantor Wilayah	B03: Pengolahan Koleksi Perpustakaan (Input Data Koleksi Perpustakaan) dalam aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil	B03: Laporan Hasil Pengolahan Koleksi	B03: 1. Membuat Database Koleksi Perpustakaan Hukum/JDIH Jawa Tengah. 2. Membuat Laporan Hasil Pengolahan Koleksi Perpustakaan Hukum melalui E- recording JDIHN.
				B06: 1. Pengolahan Koleksi Perpustakaan (Input Data Koleksi Perpustakaan) dalam	B06: Laporan Pengolahan dan Promosi Layanan Perpustakaan Hukum <i>Online</i>	B06: 1. Membuat Database Koleksi Perpustakaan Hukum/JDIH

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>Aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil</p> <p>2. Promosi Layanan Perpustakaan <i>Online</i> pada JDIH Kanwil melalui Akun Media Sosial</p>		<p>Jawa Tengah dan menyiapkan bahan promosi Layanan Perpustakaan Online pada JDIH melalui Akun Media Sosial</p> <p>2. mengadakan rapat dengan tim humas kanwil guna</p> <p>3. Mempublikasikan Layanan Perpustakaan Online pada JDIH melalui Akun Media Sosial.</p> <p>4. Menyiapkan data dukung</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						Laporan Pengolahan dan Promosi Layanan Perpustakaan Hukum Online.
				B09: Statistik Jumlah Pemustaka <i>Online</i> yang memanfaatkan Layanan Informasi Perpustakaan pada Aplikasi ILDIS / JDIH Kanwil	B09: Laporan Pemanfaatan JDIH Kanwil untuk Layanan Perpustakaan Hukum <i>Online</i>	B09: 1. Meng-invetarisir data dukung laporan pemanfaatan JDIH Kanwil untuk layanan Perpustakaan Hukum Online dengan melihat statistik yang tampil pada JDIH kawnil. 2. Menyiapkan data dukung

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						Laporan Pemanfaatan JDIH Kanwil untuk layanan Perpustakaan Hukum Online.
				B12: Melakukan evaluasi Pemanfaatan Aplikasi ILDIS / JDIH Kanwil untuk Layanan Perpustakaan <i>Online</i> di lingkungan Kantor Wilayah	B12: Laporan Hasil Evaluasi	B12: Melaksanakan rapat evaluasi pemanfaat aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil.
26.	Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah terkait Pemberdayaan UMKM dan/atau Cipta Lapangan Kerja	Termanfaatkannya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah oleh pemangku kepentingan	Tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah	B03: Terinventarisirnya semua produk hukum daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi	B03: Daftar produk hukum daerah objek analisis dan evaluasi	B03: 1. Membuat SK Tim 2. Mengirim surat ke Kab/kota untuk meminta perda/perkada terkait

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pemberdayaan UMKM dan/cipta lapangan kerja</p> <p>3. Rapat anggota Tim untuk menentukan daftar perda/perkada yang akan dianalisis berdasarkan apakah perda tsb bertentangan dgn peraturan lebih tinggi/tdk harmonis dgn peraturan daerah yg sejajar/menghambat iklim investasi</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						4. Sosialisasi pedoman AE bagi pegawai kanwil dan pemda terkait perda tersebut
				B06: Penggunaan Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum (BPHN) terhadap produk hukum daerah dalam rangka pelaksanaan analisis dan evaluasi	B06: Pengisian dokumen (matriks) sesuai dengan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum	B06: 1. Melakukan komunikasi dengan BPHN terkait penggunaan pedoman analisis dan evaluasi Hukum BPHN 2. Tim melakukan analisis dan evaluasi perda/ perkada terkait pemberdaya

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>an UMKM dan/cipta lapangan kerja sesuai pedoman analisis dan evaluasi hukum</p> <p>3. Pengisian dokumen</p> <p>4. Rapat anggota tim untuk Pengisian dokumen/ matrik sesuai pedoman</p>
				<p>B09: Penyusunan rekomendasi dan penyampaian laporan kepada BPHN dan kepada Biro/Bagian Hukum di Sekretariat Daerah</p>	<p>B09: Laporan akhir berisi dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah</p>	<p>B09: Melakukan forum pemantauan terkait Analisis dan Evaluasi ke stakeholder membuat laporan akhir berupa hasil</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						analisis dan evaluasi produk hukum daerah
27.	Pengawasan dan Perluasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Meningkatnya Kualitas Layanan Bantuan Hukum	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	B03: 1. Ditandatanganinya Kontrak Bantuan Hukum 2. Tersusunnya SK Panitia Pengawas Daerah	B03: 1. Dokumen Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani pada bulan Januari 2. SK Panitia Pengawas Daerah	B03: 1. Melakukan rapat persiapan penyelenggaraan kontrak 2. Membuat surat undangan dan Menyelenggarakan penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan hukum. 3. Membuat kontrak sejumlah 57 OBH

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						berdasarkan template kontrak pelaksanaan Bantuan Hukum dari Panitia Pengawas Pusat/BPHN. 4. Melaksanakan rapat pembentuk panitia pengawas daerah organisasi bantuan hukum.
				B06: Sosialisasi/Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk perluasan pemberian bantuan hukum melalui	B06: 1. Dokumen rapat sosialisasi/koordinasi (undangan, notula, daftar	B06: 1. Membentuk kepanitiaan sosialisasi perluasan bantuan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				pembentukan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah	hadir, dokumentasi) 2. Laporan Kegiatan Sosialisasi/koordinasi dengan pemerintah daerah untuk perluasan pemberian bantuan hukum melalui pembentukan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah	hukum melalui pembentukan perda. 2. Menyelenggarakan sosialisasi perluasan bantuan hukum 3. Menyiapkan data dukung penyusunan laporan kegiatan sosialisasi perluasan bantuan hukum.
				B09: Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah	B09: 1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi 2. Isian kuesioner Pemantauan dan	B09: 1. Membentuk tim pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					Evaluasi yang ditandatangani Penerima Bantuan Hukum	bantuan hukum. 2. Menyusun jadwal pemantauan dan evaluasi bantuan hukum. 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum. 4. Menyiapkan data dukung laporan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum.
28.	Kajian Hukum dan HAM di wilayah	Rekomendasi hasil kajian sebagai data awal (data	Termanfaatkannya Rekomendasi hasil kajian	B03: 1. Tersusunnya SK Tim Kajian	B03: 1. SK Tim Kajian	B03: 1. Menyusun SK Tim Kajian

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	<p>dengan tema:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesiapan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Menuju Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Corporate University</i> Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat 	sekunder) penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	sebagai data awal (data sekunder) penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Usulan proposal Kajian Persetujuan Proposal Kajian yang ditandatangani Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terlaksananya presentasi proposal Kajian 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Usulan dan Proposal Kajian Bukti Persetujuan Proposal Kajian yang ditandatangani Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahan presentasi proposal Kajian (format power point) Notula dan daftar hadir kegiatan Presentasi Proposal Kajian 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan rapat tim untuk menyusun Proposal Kajian Mengusulkannya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan presentasi Membuat surat undangan ke ka. Upt dan pejabat pimti, administrator, dan pengawas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					6. Foto dokumentasi kegiatan Presentasi Proposal Kajian	serta fungsional kanwil 6. Melaksanakan presentasi Proposal Kajian yang telah disetujui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
				B06: 1. Pelaksanaan pengumpulan data lapangan Kajian 2. Pengolahan dan analisa data lapangan Kajian 3. Presentasi <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian dengan	B06: 1. Hasil Data Lapangan Kajian 2. <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian 3. Bahan Presentasi <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian (ppt) 4. Notula dan Daftar hadir	B06: 1. Melaksanakan pengumpulan data lapangan Kajian HAM 2. Menyusun draft Laporan Hasil Kajian 3. Melaksanakan rapat

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>mengundang <i>stakeholders</i></p> <p>4. Penyampaian Laporan Akhir Kajian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>kegiatan Presentasi <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian yang melibatkan <i>stakeholders</i></p> <p>5. Laporan Akhir Kajian</p> <p>6. <i>Capture</i> Bukti Penyampaian Laporan Akhir Kajian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi SISUMAKER/<i>Email</i></p>	<p>presentasi Draft Laporan Hasil Kajian</p> <p>4. Menyusun Laporan Akhir Hasil Kajian yang dikirimkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM</p>
				<p>B09: Evaluasi hasil kajian yang dimanfaatkan oleh Badan Penelitian dan</p>	<p>B09: Laporan Rencana Aksi Pemanfaatan Hasil Kajian</p>	<p>B09: Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		Kajian di Wilayah dan menyusun rencana aksi pemanfaatan hasil kajian
29.	Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	Analisis kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	Laporan Analisis kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	B03: Terbitnya SK TIM Analisis kebijakan dan <i>reporting</i> berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	B03: SK Tim Analisis kebijakan dan <i>reporting</i> berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	B03: Menyusun SK Tim Analisis Kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM
				B06: Tersusunnya analisis kebijakan dan <i>reporting</i> dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	B06: Laporan analisis kebijakan dan <i>reporting</i> dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	B06: 1. TIM melaksanakan rapat penyusunan analisis kebijakan 2. Menyusun Laporan Analisis

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>Kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM</p>
				<p>B09: Tersusunnya analisis kebijakan dan pelaporan SIPKUMHAM</p>	<p>B09: Laporan analisis kebijakan dan pelaporan SIPKUMHAM</p>	<p>B09: 1. TIM melaksanakan rapat penyusunan analisis kebijakan 2. Menyusun Laporan Analisis Kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM
				B12: 1. Tersusunnya analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM 2. Evaluasi pelaksanaan analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM	B12: 1. Laporan analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM 2. Laporan evaluasi analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM	B12: 1. TIM melaksanakan rapat penyusunan analisis kebijakan 2. Menyusun Laporan Analisis Kebijakan dan <i>reporting</i> berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM 3. Melaksanakan evaluasi terhadap

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						analisis kebijakan dan reporting SIPKUMHAM
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN						
30	Percepatan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan guna penanganan over kapasitas <i>overstaying</i> dan peningkatan keterampilan narapidana melalui kerjasama	1. Menurunnya jumlah <i>overstaying</i> melalui penguatan data dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	Penanganan <i>overstaying</i> melalui penguatan data dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	B03: 1. SK penunjukan operator 2. Penyampaian keputusan bersama terkait pengembalian tahanan yang habis masa penahanan kepada para <i>stakeholder</i> 3. Melakukan supervisi dan verifikasi data tahanan dalam SDP 4. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> terkait tahanan yang <i>overstaying</i>	B03: 1. SK Operator 2. Surat penyampaian Keputusan bersama 3. Laporan supervisi dan verifikasi data tahanan 4. Surat Pemberitahuan tahanan yang <i>overstaying</i> 5. Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi penahan H-10, H-3, H-1	B03 : 1. Membuat dan mengirimkan surat endaran ke Lapas /Rutan Se Jateng untuk mengusulkan data Operator dan mengirimkan ke Kantor Wilayah. 2. Membuat SK penunjukan operator SDP di Divisi PAS 3. Membuat SK penunjukan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>5. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa penahanan H-10, H-3, H-1</p> <p>6. Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan</p>	<p>6. Laporan rekapitulasi Berita acara pengembalian tahanan</p>	<p>operator SDP di Lapas/rutan.</p> <p>4. Melaksanakan penyampaian SKB ke Lapas dan Rutan</p> <p>5. Melaksanakan supervisi dan verifikasi data tahanan dalam SDP</p> <p>6. Melaksanakan Supervisi ke 11 UPT</p> <p>7. Membuat surat ke Ka.Lapas dan Ka. Rutan agar melaporkan data overstaying kepada instansi terkait</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>dan ditembuskan ke Kantor Wilayah</p> <p>8. Membuat laporan rekapitulasi pemberitahuan penahanan yang overstaying</p> <p>9. Membuat surat ke Ka.Lapas dan Ka. Rutan agar melaporkan data yang akan habis masa penahannya(H-10, H-3, H-1) kepada instansi terkait dan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>ditembuskan ke Kantor Wilayah</p> <p>10. Membuat laporan rekapitulasi data yang akan habis masa penahanan (H-10, H-3, H-1)</p> <p>11. Memerintahkan Ka. Lapas dan Ka. Rutan untuk mengembalikan Tahanan yang telah habis masa penahannya</p> <p>12. Memerintahkan Kalapas dan Ka. Rutan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>untuk membuat BA pengembalian tahanan</p> <p>13. Membuat laporan rekapitulasi pengembalian tahanan dan mengirimkan ke Kantor Wilayah</p>
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa penahanan H-10, H-3, H-1 Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan 	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi penahan H-10, H-3, H-1 Laporan rekapitulasi Berita acara pengembalian tahanan 	<p>B06 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat surat ke Ka.Lapas dan Ka. Rutan agar menyampai kan data yang akan habis masa penahanannya (H-10,H-3,H-1) kepada

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>instansi terkait dan ditembuskan ke Kantor Wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat rekapitulasi pemberitahuan penahanan H-10, H-3, H-1 3. Memerintahkan Ka. Lapas dan Ka. Rutan untuk mengembalikan Tahanan yang telah habis masa penahanannya 4. Membuat BA pengembalian tahanan, 5. Membuat laporan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>rekapitulasi pengembalian tahanan dan mengirimkan ke Kantor Wilayah</p> <p>6. Melaksanakan Monev pada 11 UPT PAS</p>
				<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa penahanan H-10, H-3, H-1 Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan 	<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi penahan H-10, H-3, H-1 Laporan rekapitulasi Berita acara pengembalian tahanan 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat surat ke Ka.Lapas dan Ka. Rutan agar menyampai kan data yang akan habis masa penahanannya (H-10,H-3,H-1) kepada instansi terkait dan ditembuskan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>ke Kantor Wilayah.</p> <p>2. Membuat laporan rekapitulasi pemberitahuan penahanan H-10, H-3, H-1</p> <p>3. Memerintahkan Ka. Lapas dan Ka. Rutan untuk mengembalikan Tahanan yang telah habis masa penahanannya</p> <p>4. Memerintahkan Kalapas dan Ka.Rutan untuk membuat BA pengembalian tahanan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						5. Membuat laporan rekapitulasi pengembalian tahanan dan mengirimkan ke Kantor Wilayah 6. Melaksanakan Monev ke 11 UPT
				B12: 1. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa penahanan H-10, H-3, H-1 2. Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan	B12: 1. Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi penahan H-10, H-3, H-1 2. Laporan rekapitulasi Berita acara pengembalian tahanan	1. Membuat surat ke Ka.Lapas dan Ka. Rutan agar menyampaikan data yang akan habis masa penahanannya (H-10,H-3,H-1) kepada instansi terkait dan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				3. Monitoring dan evaluasi	3. Laporan monitoring dan evaluasi	<p>ditembuskan ke Kantor Wilayah</p> <p>2. Membuat laporan rekapitulasi pemberitahuan penahanan H-10, H-3, H-1</p> <p>3. Memerintahkan Ka. Lapas dan Ka. Rutan untuk mengembalikan Tahanan yang telah habis masa penahanannya</p> <p>4. Memerintahkan Kalapas dan Ka.Rutan untuk membuat BA</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pengembalian tahanan</p> <p>5. Membuat laporan rekapitulasi pengembalian tahanan dan mengirimkan ke Kantor Wilayah</p> <p>6. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi pada UPT 11 PAS,</p> <p>7. Overstaying pada Lapas dan Rutan 100% telah mendapatkan penyelesaian</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		2. Penanganan overkapasitas melalui pemberian hak kepada Narapidana secara <i>online</i>	Penanganan overkapasitas melalui pemberian hak kepada Narapidana secara <i>online</i>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Inventarisasi data narapidana yang akan mendapatkan remisi dan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sosialisasi Data Inventarisasi Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara online Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana 	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Konstek Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>Cuti Bersyarat tahun 2020</p> <p>3. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i></p> <p>4. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> tepat waktu.</p> <p>5. Terlaksananya layanan <i>self service</i> Remisi, PB, CB dan CMB secara <i>online</i></p>		<p>Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p> <p>2. Memerintahkan Kepala Bapas agar menyelesaikan masalah penjamin melalui Pembimbing Masyarakat</p> <p>3. Memerintahkan Ka. bapas agar dalam pembuatan litmas lebih disederhanakan</p> <p>4. Memerintahkan Ka.Lapas dan Ka. Rutan untuk</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>mengupdate data napi yang telah menjalani 2/3 masa pidana setiap bulan</p> <p>5. Memerintahkan Ka.UPT untuk menginventarisasi dan melaporkan data narapidana yang akan mendapatkan remisi dan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tahun 2020</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>6. Memerintahkan Ka.UPT untuk mengusulkan narapidana yang telah memenuhi syarat</p> <p>7. Membuat rekapitulasi narapidana yang akan mendapatkan remisi, PB, CMB, CB</p> <p>8. Pelaksanaan pemberian Remisi secara Online berjalan dan tepat waktu</p> <p>9. Membuat rekapitulasi data</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>Narapidana yang telah mendapatkan remisi</p> <p>10. Pelaksanaan Pemberian PB, CB dan CMB secara Online dan tepat waktu</p> <p>11. Membuat rekapitulasi data narapidana yang telah mendapat program Integrasi</p> <p>12. Membuat surat edaran ke UPT untuk mengoptimalkan layanan self service dan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>menempatkan nya di tempat yang strategis</p> <p>13. Melakukan sosialisasi penggunaan layanan self service</p> <p>14. Membuat rekapitulasi pelayanan self service</p> <p>15. Melaksanakan monev ke 11 UPT PAS</p>
				<p>B06:</p> <p>1. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i></p> <p>2. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 100% tepat waktu.</p>	<p>B06:</p> <p>1. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i></p> <p>2. Laporan pelaksanaan pemberian PB,</p>	<p>B06 :</p> <p>1. Pelaksanaan pemberian Remisi secara Online berjalan dan tepat waktu</p> <p>2. Membuat rekapitulasi</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				3. Terlaksananya layanan <i>self service</i> Remisi, PB, CB dan CMB secara <i>online</i>	CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana	data Narapidana yang telah mendapatkan remisi 3. Pelaksanaan Pemberian PB, CB dan CMB secara Online dan tepat waktu 4. Membuat rekapitulasi data narapidana yang telah mendapat program Integrasi 5. Memerintahkan Ka.UPT untuk melaksanakan sosialisasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						pemanfaatan layanan self service kepada Narapidana 6. Melakukan sosialisasi penggunaan layanan self service kepada WBP baru 7. Membuat rekap laporan pelaksanaan self service 8. Melakukan monev pada 11 UPT PAS
				B09: 1. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Terlaksananya pemberian PB, CB	B09: 1. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i>	B09 : 1. Pelaksanaan pemberian Remisi secara Online berjalan dan tepat waktu

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>dan CMB secara <i>online</i></p> <p>3. Terlaksananya layanan <i>self service</i> Remisi, PB, CB dan CMB secara <i>online</i></p>	<p>2. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i></p> <p>3. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana</p>	<p>2. Membuat rekapitulasi data Narapidana yang telah mendapatkan remisi</p> <p>3. Pelaksanaan pemberian Remisi secara Online berjalan dan tepat waktu</p> <p>4. Membuat rekapitulasi data Narapidana yang telah mendapatkan remisi</p> <p>5. Membuat rekapitulasi data narapidana</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						yang telah menggunakan layanan self service 6. Melaksanakan Monev pada 11 UPT PAS
				B12: 1. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Terlaksananya layanan <i>self service</i> Remisi, PB, CB dan CMB secara Online	B12: 1. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana	B12 : 1. Pelaksanaan pemberian Remisi secara Online berjalan dan tepat waktu 2. Membuat rekapitulasi data Narapidana yang telah mendapatkan remisi. 3. Pelaksanaan Pemberian

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						PB, CB dan CMB secara Online dan tepat waktu 4. Membuat rekapitulasi data narapidana yang telah mendapat program Integrasi 5. Membuat rekapitulasi data narapidana yang telah mengguna kan layanan self service 6. Melaksana kan Monev pada 11 UPT PAS

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		3. Meningkatnya kerjasama dengan para <i>stakeholder</i> dalam meningkatkan keterampilan narapidana	Narapidana yang terlatih, terampil dan bersertifikat	B03: 1. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan di Lapas Medium (kerjasama dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI) 2. Terlaksananya pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas Medium	B03: 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A)	B03 : 1. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kementerian PUPR RI tentang latihan keterampilan di Lapas Medium 2. Memerintahkan Ka.UPT untuk melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja terkait latihan ketrampilan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						3. Menyiapkan tempat pelatihan dan peserta pelatihan 4. Membuat laporan pelaksanaan latihan keterampilan
				B06: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas Medium	B06: 1. Standar Pendidikan Vokasi Bagi Narapidana di Lapas (Agribisnis, Manufaktur dan Jasa) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A)	B06 : 1. Memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai standar, kerjasama dengan stageholder dan mitra kerja 2. Membuat laporan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pelaksanaan latihan keterampilan</p> <p>3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan latihan keterampilan</p>
				<p>B09:</p> <p>1. Terlaksananya pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas Medium</p>	<p>B09:</p> <p>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A)</p>	<p>B09 :</p> <p>1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pelatihan keterampilan</p> <p>2. Membuat laporan pelaksanaan Sosialisasi</p> <p>3. Membuat rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						latihan keterampilan
				B12: 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Terlaksananya pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas Medium	B12: 1. Laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A)	B12 : 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada UPT PAS terkait pelaksanaan pelatihan keterampilan 2. Membuat rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan latihan keterampilan
31	Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan	1. Meningkatnya koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	Seluruh Lapas/Rutan melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	B03: Seluruh Lapas/Rutan melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	B03: Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan	B03 : 1. Membuat MoU dengan Instansi terkait

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	keamanan dan ketertiban (kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas/Rutan				dengan instansi terkait	(BNNP/TNI/POLRI) 2. Memerintahkan Ka. Lapas dan Ka. Rutan untuk membuat perjanjian kerjasama dengan instansi terkait setempat (TNI/POLRI/BNNK) 3. Melaksanakan Bintorwasdal pada 25% UPT PAS
				B06: Seluruh Lapas/Rutan melaksanakan koordinasi	B06: Laporan Pelaksanaan koordinasi	B06 : 1. Melakukan rapat koordinasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				pengamanan dengan instansi terkait	pengamanan dengan instansi terkait	dengan instansi terkait 2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi
				B09: Seluruh Lapas/Rutan melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	B09: Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	B09 : 1. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait 2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	B12 : Melaksanakan bintorwasdal ke Lapas dan Rutan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kamtib yang bersumber dari dalam maupun dari luar	1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B03: Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B03: Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B03 : 1. Membentuk tim intelijen (deteksi dini) Kantor Wilayah 2. Memerintahkan Ka. Lapas dan ka. Rutan untuk membentuk tim Intelijen(deteksi dini) pada UPT masing-masing 3. Melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						4. Menyusun laporan pelaksanaan
				B06: Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B06: Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B06 : 1. Melaksana kan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib 2. Menyusun laporan pelaksanaan
				B09: Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B09: Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B09 : 1. Melaksana kan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib 2. Menyusun laporan pelaksanaan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12: Monitoring dan Evaluasi terkait dengan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B12: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan Bintorwasdal pada UPT Pemasyarakatan
			2. Terlaksananya Sidak dan Tes Urin Bagi Petugas dan Narapidana	B03: 1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Sidak 2. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Tes Urin	B03: 1. Laporan Pelaksanaan Sidak di seluruh Lapas dan Rutan 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba	B03 : 1. Memerintah kan Ka.Lapas dan Ka.Rutan untuk melaksana n Sidak 2. Tim Satopatnal kanwil melaksana kan sidak di 25% UPT PAS 3. Menyusun laporan pelaksanaan sidak

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						4. Memerintah kan Ka.Lapas dan Ka.Rutan untuk melaksana kan Tes Urin 5. Tim Satopatnal kanwil melaksana kan Tes Urin di 25% UPT PAS 6. Menyusun laporan pelaksanaan Tes Urin
				B06: 1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Sidak 2. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Tes Urin	B06: 1. Laporan Pelaksanaan Sidak di seluruh Lapas dan Rutan 2. Laporan Pelaksanaan Tes	B06 : 1. Memerintah kan Ka.Lapas dan Ka.Rutan untuk melaksana kan Sidak

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					<p>Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tim Satopatnal kanwil melaksanakan sidak di 25% UPT PAS 3. Menyusun laporan pelaksanaan sidak 4. Memerintahkan Ka.Lapas dan Ka.Rutan untuk melaksanakan Tes Urin 5. Tim Satopatnal kanwil melaksanakan Tes Urin di 25% UPT PAS

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						6. Menyusun laporan pelaksanaan Tes Urin
				B09: 1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Sidak 2. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Tes Urin	B09: 1. Laporan Pelaksanaan Sidak di seluruh Lapas dan Rutan 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba	B09 : 1. Memerintahkan Ka.Lapas dan Ka.Rutan untuk melaksanakan Sidak 2. Tim Satopatnal kanwil melaksanakan sidak di 25% UPT PAS 3. Menyusun laporan pelaksanaan sidak 4. Memerintahkan Ka.Lapas dan Ka.Rutan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>untuk melaksanakan Tes Urin</p> <p>5. Tim Satopatnal kanwil melaksanakan Tes Urin di 25% UPT PAS</p> <p>6. Menyusun laporan pelaksanaan Tes Urin</p>
				B12: Monitoring dan Evaluasi terkait dengan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B12: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	B12 : Melaksanakan Monitoring dan evaluasi hasil laporan Pelaksanaan sidak dan tes urin pada UPT PAS

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		3. Lapas/Rutan bebas dari peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi pelaksanaan Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedisiplinan Petugas 2. Pelaksanaan Tugas Pengamanan area Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan Pengaman Pintu Utama (P2U) 3. Pelaksanaan Layanan Kunjungan 4. Pelaksanaan Penjagaan 5. Pengamanan Pelaksanaan Mapenaling 6. Pelaksanaan Pengawalan 7. Pelaksanaan Penempatan Narapidana/Tahanan Dalam Kamar Hunian 	B03: Seluruh Lapas dan Rutan telah membentuk Tim Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal)	B03: Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal)	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Wilayah membentuk tim Satopatnal 2. Memerintahkan Ka. UPT PAS untuk membentuk tim satopatnal 3. Tim Satopatnal kantor Wilayah melakukan bintorwasdal pada 15 UPT di Jawa Tengah (25%) tentang kedisiplinan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
			8. Layanan Penyediaan Makanan dan Kebutuhan Dasar Lainnya 9. Layanan Registrasi dan Integrasi			pegawai, Wasrik, layanan kunjungan, pelaksanaan penjagaan, pelaksanaan mapenaling, pelaksanaan pengawalan, pelaksanaan penempatan, layanan penyediaan makanan, layanan registrasi dan integrasi
				B06: Seluruh Lapas dan Rutan telah melaksanakan tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal)	B06: Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal	B06 : 1. Tim Satopatnal Kanwil melaksanakan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					(Satopspatnal)	<p>Bintorwasdal tentang tugas dan fungsi Tim Satopspatnal pada 25% UPT PAS</p> <p>2. Menyusun laporan kegiatan</p>
				<p>B09: Seluruh Lapas dan Rutan telah melaksanakan tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal)</p>	<p>B09: Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal)</p>	<p>B09 :</p> <p>1. Tim Satopatnal Kanwil melaksanakan Bintorwasdal tentang tugas dan fungsi Tim Satopspatnal pada 25% UPT PAS</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						2. Menyusun laporan kegiatan
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Pelaksanaan dan evaluasi	B12 : 1. Tim Satopatnal Kanwil melaksanakan Bintorwasdal tentang tugas dan fungsi Tim Satopspatnal pada 25% UPT PAS 2. Menyusun laporan kegiatan
32	Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi	Tahanan/Narapidana/ Anak pecandu narkotika memperoleh Layanan Rehabilitasi Narkotika	Terselenggaranya layanan rehabilitasi narkotika bagi Tahanan, Narapidana dan Anak	B03: Pembentukan mentor rehabilitasi narkotika di tingkat wilayah	B03: Daftar mentor Rehabilitasi Narkotika	B03 : 1. Membentuk dan mengangkat tim mentor

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	Tahanan, WBP dan Anak					rehab Kantor Wilayah, 2. Membentuk tim mentor rehab pada UPT, 3. Menjalin kerjasama dengan IPWL, BNNP, BNNK dan Dinas Kesehatan tentang dukungan dan pelatihan tenaga konselor adiksi, asesor dan mentor rehabilitasi narkotika

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						bagi Tim Mentor
				B06: Supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasarakatan	B06: Laporan supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di wilayah	B06 : 1. Melakukan supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika pada 15 UPT PAS 2. Menyusun laporan manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di Lapas Rehab
				B09: Supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi	B09: Laporan supervisi manajemen penyelenggaraan	B09 : 1. Melakukan supervisi manajemen

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				narkotika di UPT Pemasyarakatan	layanan rehabilitasi narkotika di wilayah	penyelengga raan layanan rehabilitasi narkotika pada 15 UPT PAS, 2. Menyusun laporan manajemen penyelengga raan layanan rehabilitasi narkotika di Lapas Rehab
				B12: Evaluasi tahunan penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika	B12: Laporan evaluasi tahunan penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika	B12 : Melaksanakan supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika pada 14 UPT PAS dan menyusun

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						Laporan Evaluasi Tahunan Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN						
33.	Pelayanan Paspur Simpatik	Terwujudnya pelayanan Paspur RI kepada Masyarakat di luar hari kerja	Meningkatnya jumlah permohonan paspor yang terlayani di luar hari kerja Satuan Kerja Teknis	B03: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan	B03: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan	B03: 1. Menyusun Jadwal Kegiatan Layanan 2. Penentuan Jadwal dan tempat a. Pelayanan Passport Simpatik untuk instansi pemerintah b. Pelayanan Passport Simpatik

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pada minggu ke 2 dan ke 4 di kanim Semarang dan Surakarta</p> <p>c. Pelayanan Passport Simpatik pada minggu ke 3 di Pematang, Pati dan Wonosobo, Cilacap</p> <p>3. Sosialisasi jadwal kegiatan layanan Simpatik pada berbagai media</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan	B06: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan	B06: 1. Penentuan Jadwal dan tempat a. Pelayanan Passport Simpatik untuk instansi pemerintah b. Pelayanan Passport Simpatik pada minggu ke 2 dan ke 4 di kanim Semarang dan Surakarta c. Pelayanan Passport Simpatik pada

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>minggu ke 3 di Pemalang, Pati dan Wonosobo , Cilacap</p> <p>2. Sosialisasi jadwal kegiatan layanan Simpatik pada berbagai media</p>
				<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 	<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan 	<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Jadwal dan tempat <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Passport Simpatik untuk instansi pemerintah b. Pelayanan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan		Passport Simpatik pada minggu ke 2 dan ke 4 di kanim Semarang dan Surakarta 2. Pelayanan Passport Simpatik pada minggu ke 3 di Pemalang, Pati dan Wonosobo, Cilacap Sosialisasi jadwal kegiatan layanan Simpatik pada berbagai media

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan 5. Evaluasi dan Rekomendasi	B12: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan 5. Laporan Evaluasi dan Rekomendasi	B12: 1. Penentuan Jadwal dan tempat a. Pelayanan Passport Simpatik untuk instansi pemerintah b. Pelayanan Passport Simpatik pada minggu ke 2 dan ke 4 di kanim Semarang dan Surakarta c. Pelayanan Passport Simpatik pada

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>minggu ke 3 di Pemalang, Pati dan Wonosobo , Cilacap</p> <p>2. Sosialisasi jadwal kegiatan layanan Simpatik pada berbagai media</p>
34.	Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian	1. Tersedianya Laporan Harian Intelijen (LHI)	Laporan Intelijen tepat waktu	B03: 1. Kadivim dan Ka.UPT mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tentang pembuatan LHI dan Perkiraan Keadaan (Kirka) Intelijen	B03: 1. Laporan pelaksanaan mengikuti sosialisasi LHI 2. SK Kakanwil	B03: 1. Kepala Divisi Keimigrasian harus dapat memastikan para KAUP- nya untuk membuat Laporan Harian Inteligen

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				2. Penerbitan SK Kakanwil tentang pelaksanaan pembuatan LHI dan Perkiraan Keadaan Intelijen kepada Kadivim dan KaUPT 3. Pembuatan LHI dan Kirka Intelijen oleh Ka.UPT		melalui aplikasi / Kesisteman 2. LHI yang disampaikan para KAUPPT ke kantor pusat / divisi imigrasi harus dibuatkan analisis sebagai bahan penyusunan KIRKA untuk diantisipasi / pencegahan (cegah dini) minimal 1 bulan sekali
				B06: 1. KaUPT membuat LHI dan Perkiraan	B06: 1. Laporan pelaksanaan	B06: 1. Kepala Divisi Keimigrasian

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Keadaan Intelijen bulanan 2. Kadivim membuat kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari KaUPT dengan menggunakan format dari Ditjen Imigrasi	pembuatan produk LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari KaUPT 2. Laporan Kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Kadivim	harus dapat memastikan para KAUPT-nya untuk membuat Laporan Harian Inteligen melalui aplikasi / Kesisteman 2. LHI yang disampaikan para KAUPT ke kantor pusat / divisi imigrasi harus dibuatkan analisis sebagai bahan penyusunan KIRKA untuk

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						diantisipasi / pencegahan (cegah dini) minimal 1 bulan sekali
				B09: 1. Ka.UPT membuat LHI dan Kirka Intelijen bulanan 2. Kadivim membuat kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Ka.UPT dengan menggunakan format dari Ditjen Imigrasi	B09: 1. Laporan pelaksanaan pembuatan produk LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Ka.UPT 2. Laporan Kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Kadivim	B09: 1. Kepala Divisi Keimigrasian harus dapat memastikan para KAUPT-nya untuk membuat Laporan Harian Inteligen melalui aplikasi / Kesisteman 2. LHI yang disampaikan para KAUPT ke kantor pusat / divisi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>imigrasi harus dibuatkan analisis sebagai bahan penyusunan KIRKA untuk diantisipasi / pencegahan (cegah dini) minimal 1 bulan sekali</p>
				<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka.UPT membuat LHI dan Kirka Intelijen bulanan 2. Kadivim membuat kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari KaUPT dengan menggunakan 	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan pembuatan produk LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Ka.UPT 2. Laporan Kompilasi LHI dan Kirka 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Keimigrasian harus dapat memastikan para KAUPT-nya untuk membuat Laporan Harian Inteligen

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				format dari Ditjen Imigrasi 3. Evaluasi terkait Laporan Harian Intelijen dan Kirka Intelijen bulanan dari UPT	Intelijen bulanan dari Kadivim 3. Laporan Evaluasi terkait Laporan Harian Intelijen dan Kirka Intelijen bulanan	melalui aplikasi / Kesisteman 2. LHI yang disampaikan para KAUPPT ke kantor pusat / divisi imigrasi harus dibuatkan analisis sebagai bahan penyusunan KIRKA untuk diantisipasi / pencegahan (cegah dini) minimal 1 bulan sekali
		2. Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindakan Hukum	1. Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap	B03: 1. Pemetaan orang asing	B03: 1. Surat Pemberitahuan	B03:

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
			<p>Pelanggaran Keimigrasian WNI dan WNA</p> <p>2. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum pada seluruh UPT yang dibawah</p>	<p>2. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal</p> <p>3. Operasi Pengawasan (Prov/Kab/Kota) dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 25% Wilayah Kerja Kanwil</p> <p>4. Operasi pemantauan dan pendataan orang asing 25% Wilayah Kerja Kanwil</p> <p>5. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di 25 % Wilayah Kerja Kanwil</p>	<p>2. Surat Perintah Pengawasan</p> <p>3. Laporan pengawasan</p> <p>4. Laporan Sosialisasi</p>	<p>PROJU minimal 5% dari seluruh kasus setiap kantor imigrasi</p>
				<p>B 06:</p> <p>1. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis</p>	<p>B06:</p> <p>1. Surat Pemberitahuan</p>	<p>B06:</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>masa berlaku izin tinggal</p> <p>2. Operasi Pengawasan dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 50% Wilayah Kerja Kanwil</p> <p>3. Operasi pemantauan dan pendataan orang asing di 50% Wilayah Kerja yang dibawah</p> <p>4. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di 50% Wilayah Kerja Kanwil</p>	<p>2. Surat Perintah Pengawasan</p> <p>3. Laporan pengawasan</p> <p>4. Laporan Sosialisasi</p>	<p>PROJU minimal 5% dari seluruh kasus setiap kantor imigrasi</p>
				<p>B09:</p> <p>1. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal</p>	<p>B09:</p> <p>1. Surat Pemberitahuan</p> <p>2. Surat Perintah Pengawasan</p>	<p>B09:</p> <p>PROJU minimal 5% dari seluruh kasus setiap kantor imigrasi</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				2. Operasi Pengawasan dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 75% Wilayah Kerja Kanwil 3. Operasi pemantauan dan pendataan orang asing di 75% Wilayah Kerja Kanwil 4. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di 75% Wilayah Kerja Kanwil	3. Laporan pengawasan 4. Laporan Sosialisasi	
				B12: 1. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal 2. Operasi Pengawasan dalam rangka penyidikan /	B12: 1. Surat Pemberitahuan 2. Surat Perintah Pengawasan 3. Laporan pengawasan	B12: PROJU minimal 5% dari seluruh kasus setiap kantor imigrasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				penegakan hukum di 100% Wilayah Kerja Kanwil 3. Operasi pemantauan dan pendataan orang asing di 100% Wilayah Kerja Kanwil 4. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di 100% Wilayah Kerja Kanwil 5. Evaluasi dan Rekomendasi	4. Laporan Sosialisasi 5. Laporan Evaluasi dan Rekomendasi	